

PENGARUH PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PERANGKAT DESA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Agus Wahyudi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Teknologi Sumbawa
agus.wahyudi@uts.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja manajerial perangkat desa yang dimoderasikan oleh sistem pengendalian intern. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan responden yakni kepala desa dan ketua badan permusyawaratan. Jumlah desa yang menjadi responden yakni berjumlah 75 desa sehingga total responden berjumlah 150 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 30,2% variabel kinerja manajerial perangkat desa mampu dijelaskan oleh variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern. Hasil statistik menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa dan sistem pengendalian intern mampu memoderasi pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat yang berada di wilayah desa tersebut untuk selalu melakukan pengevaluasian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh perangkat desa yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa.

Kata Kunci: Kinerja Manajerial Perangkat Desa, Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern

Abstract

This study aims to examine the effect of the utilization of the village financial system application on the managerial performance of the village apparatus which is moderated by the internal control system. This research is a quantitative research that is associative in nature. This research was conducted on village officials in the Sumbawa Regency area with respondents namely the village head and the chairman of the consultative body. The number of villages that become respondents is 75 villages so that the total number of respondents is 150 respondents. The results showed that 30.2% of the managerial performance variables of village officials were able to be explained by the variable utilization of the village financial system and internal control systems. The statistical results show that the utilization of the village financial system application does not affect the managerial performance of the village apparatus and the internal control system is able to moderate the utilization of the village financial system application to the managerial performance of the village apparatus. The results of this study also have implications for local governments,

village governments, and communities in the village area to always evaluate the work carried out by village officials which can ultimately improve the managerial performance of village officials.

Keywords: Managerial Performance of Village Apparatuses, Utilization of Village Financial System Applications, Internal Control Systems

I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang merupakan bagian terintegral dari pembangunan daerah dan nasional tidak lepas dari prinsip otonomi daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di mana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi desa, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada masyarakat maupun pemerintah di atasnya. Otonomi desa telah memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk menggali potensi alam dan potensi ekonomi yang dimiliki serta melakukan pemerataan pembangunan melalui program-program kegiatan dengan skala prioritas (Bhakti, *et al*, 2015). Dalam penyuksesan Undang-Undang ini, pemerintah pusat semenjak tahun 2014 telah mengalokasikan dana desa untuk membiayai kebutuhan desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adanya Peningkatan pendapatan desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sebagai organisasi sektor publik, perangkat desa dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong perangkat desa untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparansi, akuntabel dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada perangkat desa (Putra, 2013). Di mana kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan dan programnya yang bertujuan untuk melayani masyarakat (Ermawati, 2017). Di mana untuk menilai kinerja manajerial perangkat desa dapat dilihat dari adanya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa serta adanya sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam mereka bekerja.

Aplikasi sistem keuangan desa atau yang sering dikenal dengan Siskeudes merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa (Malahika, *et al*, 2018). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah mengembangkan aplikasi ini. Di mana Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pengembangan aplikasi tersebut serta melakukan tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Penerapan aplikasi tersebut tentunya disertai harapan agar dapat berjalan efektif sehingga mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, bebas dari penyalahgunaan dana serta pelaporan yang tepat waktu sehingga menunjang kinerja manajerial pemerintah desa (Saputri, 2018). Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan terhadap publik akan semakin meningkat dan

menghasilkan informasi secara cepat dan akurat sehingga kinerja manajerial perangkat desa semakin meningkat.

Penggunaan aplikasi siskeudes ini sudah berjalan semenjak Bulan Mei 2017 di wilayah Kabupaten Sumbawa, namun tidak dipungkiri bahwa penggunaan aplikasi siskeudes di beberapa desa di Kabupaten Sumbawa belum maksimal. Hal ini disebabkan masih belum bagusnya sumber daya manusia seperti desa-desa di wilayah Kecamatan Batu Lanteh dari enam desa yang ada empat diantaranya merupakan desa sangat tertinggal (pulausumbawanews.net, 2018).

Agar berjalannya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan peningkatan kinerja manajerial maka perlu dilakukan pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah. Pengendalian intern digunakan sebagai alat ukur kegiatan dalam instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan menunjang kinerja perangkat desa (Saputri, 2018). Hal ini sejalan dengan tujuan dari sistem pengendalian intern sendiri yakni untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan pemerintah desa, keandalan pelaporan keuangan desa, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yakni kinerja kepala desa di Kecamatan Moyo Utara diapresiasi oleh Bupati Sumbawa. Di mana Bupati menilai, selesainya APBDes secara tepat waktu mencerminkan adanya kekompakan dan kebersamaan antara kepala desa, aparatur desa dan semua unsur yang ada di desa tersebut. Selain itu penyelesaian APBDes juga tidak terlepas dari sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (pulausumbawanews.net, 2018).

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, *et al* (2019), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, *et al* (2019), penelitian ini menggunakan variabel sistem pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi hubungan antara pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan kinerja manajerial perangkat desa.

Berangkat dari hal-hal tersebut sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi.

II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Stewardship Theory megasumsikan bahwa pengelolaan organisasi difokuskan pada keharmonisan diantara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. *Stewardship theory* menggambarkan manajer tidaklah termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan kepentingan publik. Sehingga *steward* bekerja atas keinginan publik dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas. *Steward* yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi akan mampu memuaskan kebutuhan dari organisasi tersebut, sebab sebagian besar pemangku kepentingan yang memiliki

kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan pelayanan yang diraih organisasi. Sehingga pemimpin akan termotivasi dalam memaksimalkan kinerjanya (Donalson dan James 1991).

Implikasi *stewardship theory* pada penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi perangkat desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka dalam hal ini perangkat desa mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa dan melakukan pengendalian intern yang bertujuan untuk menunjang peningkatan kinerja manajerial perangkat desa.

Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Berdasarkan *stewardship theory*, masyarakat mengharapkan tanggung jawab bersama sesuai dengan kontribusi pemerintah desa. Hal ini berimplikasi pada tuntutan masyarakat agar pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan pada desa tersebut. Untuk menciptakan pertanggungjawaban tersebut, sejak 2015 perangkat desa telah memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Aplikasi ini digunakan oleh bendahara desa untuk mempermudahnya dalam menatausahakan keuangan desa dan menghasilkan informai laporan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja manajerial (Chintya, 2015). Sehingga diharapkan bendahara desa dapat memanfaatkan aplikasi siskeudes secara efektif. Saputri (2018) dalam tulisannya menyatakan bahwa Sebuah sistem akan efektif jika pengguna merasa puas dalam pengaplikasiannya, sistem mudah digunakan, biaya penerapan lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh organisasi dan data yang dihasilkan akan menunjang kinerja organisasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga organisasi mampu mencapai tujuannya dan mendukung pengambilan keputusan.

Susanti, (2014); Chintya (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Di mana adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adanya informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi lebih efektif apabila dapat mendukung penggunaan informasi atau pengambilan keputusan. Manajer yang memiliki informasi umumnya mampu untuk membuat perencanaan yang lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja manajer akan meningkat. Dalam pemanfaatan aplikasi siskeudes, Saputri (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan siskeudes berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, di mana adanya aplikasi akan membentuk laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kinerja pemerintah desa meningkat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Oktari (2013); Damayanti (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah relatif kurang optimal dan belum menunjukkan arah pembentukan *e-Government* yang baik.

Dengan adanya pemahaman tentang aplikasi sistem keuangan desa oleh bendahara desa, sehingga mempermudahnya dalam bekerja maka dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa.

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Stewardship theory didefinisikan sebagai situasi di mana perangkat desa tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya. Hal ini diartikan bahwa perangkat desa bekerja atas kepentingan publik. Sehingga untuk tercapainya hal ini maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa harus memiliki kompeten dalam memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa. Tidak hanya sebatas memiliki kompeten saja, namun perangkat desa perlu pengawasan dalam pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sehingga dengan terciptanya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa secara maksimal maka akan lebih mudah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik dengan didukung adanya pengendalian intern.

Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putri (2013); Susanti (2104); Chintya (2015); Maharani, *et al* (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Taradipa (2017); serta Saputri (2018), Wahyudi, *et al*, (2019) menerangkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja. Adanya perangkat desa yang menerapkan sistem pengendalian intern yang baik akan mampu menghasilkan kegiatan yang baik pula. Sehingga adanya kegiatan yang baik tersebut membuat perangkat desa lebih mudah dalam pencapaian kinerja manajerial yang lebih baik. Kemudian hasil penelitian Suryanto, *et al*, (2017) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini berarti ketika perangkat desa memiliki kompetensi dalam pemanfaatan aplikasis sistem keuangan desa maka akan meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017), di mana pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sehingga adanya pengendalian intern tidak akan mempengaruhi tingkat kinerja yang dilakukan oleh perangkat desa. Mayarani, *et al*, (2017) juga menunjukkan indikator pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian Darmawan (2019) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, hal ini disebabkan karena salah satu unsur tidak seimbang, pengalaman kerja, keterampilan, serta karakter pegawai.

Dengan adanya pengendalian intern yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam pemanfaatan sistem keuangan desa maka akan mempermudah dalam meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Intern mampu memoderasi pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini yang bersifat menanyakan hubungan sebab akibat antara variabel independen yakni pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dengan variabel dependen yakni kinerja manajerial perangkat desa serta adanya sistem pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa yang berjumlah 157 desa.

Teknik Pengambilan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti ialah menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa, desa-desa yang memperoleh transfer alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) dan desa-desa yang mendapatkan bantuan keuangan kepada masyarakat yang disalurkan untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMDEs). Alasan peneliti menggunakan pertimbangan tersebut ialah karena dalam implementasi siskeudes diterangkan bahwa desa memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang besarnya cukup relatif dan bervariasi sehingga menuntut pertanggungjawaban yang lebih tinggi dalam pengelolaannya. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner diisi oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 150 responden.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Di bawah ini disajikan tabel 1 tentang definisi operasional variabel dan pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator
1	Kinerja manajerial perangkat desa (Aprilia, 2017)	Kemampuan atau prestasi kerja yang dicapai oleh perangkat desa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya	a. Kualitas pekerjaan b. Tanggung jawab c. Pelaksanaan tugas d. Memahami peraturan e. Aktif terhadap aktivitas f. Teliti dalam bekerja

		dalam menjalankan kegiatannya.	g. Keberhasilan menjalankan tugas
2	Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (Saputri, 2018)	Penggunaan aplikasi siskeudes yang diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan desa dengan tujuan memfasilitasi aparatur desa dalam pembuatan laporan keuangan desa dengan mudah, cepat dan tepat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.	a. Mudah digunakan b. Kepuasan pengguna c. Data atau laporan yang dihasilkan cepat/tepat waktu d. Dilengkapi keamanan e. Ekonomis
3	Sistem pengendalian intern (Putri, 2013; Saputri, 2018)	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala desa dan seluruh aparatur desa untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pemerintah desa melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Aktivitas pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan pengendalian

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2019)

Dalam menilai indikator tersebut, peneliti menggunakan skala *likert* dengan bobot satu untuk sangat tidak setuju, dua untuk tidak setuju, tiga untuk setuju, dan empat untuk sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yakni (1) Uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dengan ketentuan jika nilai r hitung lebih dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka butir-butir pernyataan tersebut valid dan uji reliabilitas dengan ketentuan dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2016:47-48). (2) Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* pada tingkat signifikan 5%, uji multikolonieritas dengan cara melihat angka *collinearity Statistics* yang ditunjukkan oleh Nilai *Variance inflation Factor (VIF)*. Jika angka $VIF > 10$, maka variabel bebas memiliki masalah multikolonieritas dan nilai tolerance pada output penilaian multikolonieritas yang tidak menunjukkan nilai lebih besar dari 0,1 akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi masalah multikolonieritas, dan uji

heteroskedastisitas menggunakan uji *rank spearman* dengan kriteria Jika nilai signifikansi variabel independen $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (3) Uji Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. (4) Uji kesesuaian model yang digunakan apakah model yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai atau tidak yakni jika nilai F lebih besar daripada 4 dan nilai signifikan kurang dari 5% ($<5\%$) maka semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. (5) Uji statistika parameter individual atau uji t dengan ketentuan apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t-tabel ($T_{hitung} > T_{tabel}$), maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. (Ghozali, 2016;97). (6) Analisis regresi linier berganda, di mana dalam penelitian ini memiliki persamaan linier berganda seperti berikut ini:

$$KPD = a + b_1PAS + b_2PAS \times SPI + e \dots$$

Keterangan:

KPD = Kinerja Manajerial Perangkat Desa

a = Konstanta

$b_1 - b_4$ = Koefisien Regresi

PAS = Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

SPI = Sistem Pengendalian Intern

e = Error/Variabel Pengganggu

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian dan Karakteristik Responden

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan rata-rata 45 Km. Kecamatan terjauh yaitu kecamatan tarano dengan jarak tempuh 103 km. Kabupaten Sumbawa terbagi atas 24 kecamatan, 157 desa, 8 kelurahan, dan 657 dusun/lingkungan. Dalam menjalankan pemerintahan sampai level desa, seorang kepala desa/lurah dibantu oleh aparat desa/kelurahan yang berada dibawah naungannya. Kepala desa/lurah di Kabupaten Sumbawa berjumlah 165 orang, aparat desa/kelurahan berjumlah 1.913 orang, badan permusyawaratan desa 1.146 orang, ketua rukun warga (RW) 1.159 orang, dan ketua rukun tetangga (RT) 2.940 orang. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa ialah 449.680 orang (www.sumbawakab.bps.go.id, 2018).

Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden, kuesioner semuanya kembali dan dapat di olah. Berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 146 responden adalah laki-laki atau berkisar 97,3% dan sisanya sebanyak 4 responden atau 2,7% adalah perempuan. Umur responden terbanyak berada pada interval 41-50 tahun yakni sebanyak 76 orang atau 50,7%, kedua disusul pada interval 51-60 tahun yakni 43 orang atau 28,7%, ketiga disusul pada interval 31-40 tahun yakni 27 orang atau 18%, keempat pada interval >60 tahun yakni 3 orang atau 2%, dan terakhir berada pada interval 20-30 tahun yang berjumlah 1 orang atau 0,7%. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa umur kepala desa minimal 25 tahun dan ketua badan permusyawaratan desa minimal 20 tahun.

Berdasarkan tingkat pendidikan dari responden pada urutan pertama ialah SMA yakni berjumlah 106 orang atau 70,7%, kedua S-1 berjumlah 33 orang atau

22%, ketiga SMP dan D-3 berjumlah masing-masing 4 orang atau 2,7%, dan keempat D-2 berjumlah 3 orang atau 2%. Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tahun 2017 bahwa minimal tingkat pendidikan kepala desa dan ketua badan permusyawaratan desa ialah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan masa kerja dari responden pada urutan pertama ialah kurang dari 5 tahun yakni berjumlah 66 orang atau 44%, urutan kedua yakni dengan masa kerja lebih dari 10 tahun yakni berjumlah 59 orang atau 39,3%, dan terakhir 5-10 tahun berjumlah 25 orang atau 16,7%. Hal ini membawa arti penting bahwa diperlukan pemahaman dan tindakan yang lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa karena masa kerja didominasi oleh responden kurang dari 5 tahun.

Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil olahan data seluruh pernyataan dikatakan valid. Hal ini dikarenakan r tabel lebih besar dari r hitung. Dengan demikian variabel kinerja manajerial perangkat desa, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern memiliki nilai r hitung lebih dari 0,160 sehingga dinyatakan item pernyataan yang digunakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel reliabel karena nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini meliputi (1) uji normalitas di mana nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yakni berjumlah 0,200, hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal dikarenakan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, (2) uji multikolonieritas di mana disimpulkan variabel bebas dalam penelitian ini bebas dalam masalah multikolonieritas, hal ini dikarenakan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan (3) uji heteroskedastisitas di mana dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi keempat variabel tersebut lebih dari 0,05.

Uji Koefisiensi Determinasi Regresi (R^2)

Berdasarkan nilai *Adjusted R²* yakni sebesar 0,302, hal ini berarti sebanyak 30,2% variabel kinerja manajerial perangkat desa mampu dijelaskan oleh variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern. Sedangkan sisanya 69,8% (100%-30,2%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelien ini.

Uji Kelayakan Model

Berdasarkan uji ANOVA yakni pada nilai F dan tingkat signifikansi maka hasilnya menunjukkan bahwa nilai F sebesar 33,271 sehingga model yang digunakan layak untuk dilakukan pengujian hipotesis. Hal ini dikarenakan nilai F lebih besar dari 4. Nilai signifikansi juga menunjukkan angka kurang dari 0,05 yakni 0,000 sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

Uji Statistika Parameter Individual atau Uji t

Hasil uji statistika parameter individual (uji statistika t) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Statistika Parameter Individual (Uji Statistka t)

Variabel		Nilai t	Nilai Signifikansi
Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa		-1,193	0,235
Sistem pengendalian intern memoderasi hubungan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan kinerja manajerial perangkat desa		4,467	0,000

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat untuk variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa nilai $t = -1,193$ dan nilai signifikansi $0,235$. Hal ini bermakna bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} = -1,193 > t_{tabel} 1,976$) dan nilai signifikansi kurang dari $0,235$. Sehingga hipotesis pertama ditolak.

Variabel sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja manajerial perangkat desa menunjukkan hasil yang signifikan yakni $0,000$ dengan nilai t hitung $= 4,467$. Hal ini berarti sistem pengendalian intern mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja manajerial perangkat desa, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} = 4,467 > t_{tabel} 1,976$) dan nilai signifikansi kurang dari $0,05$. Sehingga hipotesis kedua diterima.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian statistika parameter individual menghasilkan model regresi sebagai berikut:

$$KPD = 2,471 - 0,176PAS + 0,129PAS \times SPI + e$$

di mana:

KPD = Kinerja Manajerial Perangkat Desa

PAS = Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

SPI = Sistem Pengendalian Intern

e = error/gangguan

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa bernilai negatif sebesar $-0,176$, hal ini menggambarkan bahwa variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Untuk variabel sistem pengendalian intern yang digunakan untuk memoderasi pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan kinerja manajerial perangkat desa bernilai positif yakni sebesar $0,126$. hal ini menggambarkan bahwa variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa.

IV. PEMBAHASAN

Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang di mana menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, hal ini tidak dapat membuktikan bahwa pemanfaatan aplikasi

sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Sesuai dengan adanya *stewardship theory* yang menuntut perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya. Untuk menciptakan pertanggungjawaban tersebut maka perangkat desa dapat memanfaatkan aplikasi sistem keuangan secara maksimal khususnya bendahara desa. Adanya aplikasi ini akan membuat bendahara desa lebih mudah dalam menatausahakan keuangan desa dan menghasilkan informasi laporan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang akhirnya digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan, sehingga kinerja perangkat desa semakin baik.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Nasir dan Oktari (2013); Damayanti (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah relatif kurang optimal dan belum menunjukkan arah pembentukan *e-Government* yang baik. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Susanti (2014); Chintya (2015) yang mana dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian Saputri (2018) yakni pemanfaatan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mampu memoderasi pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan kinerja manajerial perangkat desa. Hasil penelitian ini mendukung adanya *Stewardship theory* yang didefinisikan sebagai situasi di mana perangkat desa tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya. Hal ini diartikan bahwa perangkat desa bekerja atas kepentingan publik. Sehingga untuk tercapainya hal ini maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa harus memiliki kompetensi dalam memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa. Tidak hanya sebatas memiliki kompetensi saja, namun perangkat desa perlu pengawasan dalam pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sehingga dengan terciptanya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa secara maksimal maka akan lebih mudah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik dengan didukung adanya pengendalian intern.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putri (2013); Susanti (2014); Chintya (2015); Maharani, *et al* (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Taradipa (2017); serta Saputri (2018), Wahyudi, *et al*, (2019) menerangkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian hasil penelitian Suryanto, *et al*, (2017) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini berarti ketika perangkat desa memiliki kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa maka akan meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa dengan didukung adanya pengendalian intern yang dilakukannya oleh kepala desa. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Damayanti (2017), Maryani, *et al* (2017) di mana pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sehingga adanya pengendalian intern tidak akan mempengaruhi tingkat kinerja yang dilakukan oleh perangkat desa. Kemudian Darmawan (2019) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, hal ini disebabkan karena salah satu unsur tidak seimbang, pengalaman kerja, keterampilan, serta karakter pegawai.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini disebabkan pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah relatif kurang optimal dan belum menunjukkan arah pembentukan *e-Government* yang baik
2. Sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini berarti ketika perangkat desa memiliki kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa maka akan meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa dengan didukung adanya pengendalian intern yang dilakukn oleh kepala desa

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Secara teori, temuan ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan bahwa dengan adanya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa akan berimplikasi pada peningkatan kinerja manajerial perangkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa yang didukung dengan adanya peningkatan sistem pengendalian intern.

Secara praktis, hasil temuan ini dapat menjadi sumber informasi terkait pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern serta sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Secara kebijakan, temuan ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan pemerintah di atasnya yang berkaitan dengan kinerja manajerial perangkat desa yang dipengaruhi oleh pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern sebagai bahan evaluasi dan melakukan fungsi monitoring dalam meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat dikembangkan dan diperbaiki pada penelitian di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada kepala desa dan ketua badan permusyawaratan desa, sementara dalam hal penunjang kinerja manajerial perangkat desa dapat dinilai oleh perangkat desa yang berada di pemerintahan desa tersebut. Sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan

responden seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa yang berada di wilayah pemerintahan desa tersebut agar memperoleh gambaran yang jelas tentang kinerja manajerial perangkat desa.

2. Dilihat dari hasil *Adjusted R²* bahwa hanya 30,2% variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern mampu menjelaskan variabel kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga kurang mengeksplorasi variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh. Sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa misalnya kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi, komitmen organisasi, persepsi inovasi, budaya organisasi, dan evaluasi anggaran.

Daftar Pustaka

- Afrida, N. 2013. Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol 1(2); 1-22.
- Bhakti, D.C., E. Pituringsih, dan E. Widiastuty. 2015. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (Assets)* Vol. 5(1); 29-43.
- Candrakusuma, D.A., dan B. Jatmiko. 2017. Dampak Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol 24(1); 87-93.
- Chintya, I. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok). *Jurnal Akuntansi* Vol. 3(1); 1-15.
- Damayanti, S. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang). *Skripsi*. Progran Studi Strata-S1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Darmawan, D. 2019. Peranan Motivasi dan Kompetensi: Analisis Kinerja Pegawai Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. 3(2); 122-131.
- Donaldson, L. dan J.H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governace and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. Vol 16(1); 49-65.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 33*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Maharani, F.L, S.P.D Sofianti, S.M. Wardayanti. 2015. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan pada Divisi Pelayanan Medis di Rumah Sakit Jember Klinik. *Jurnal Akuntansi* Vol. 13(2); 57-69.
- Malahika, J.M., H. Karamoy, dan R.J. Pusung. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 13(4); 578-583.

- Mayarani, E.I, A.D.D. Santoso, G.B. Riyandaru, dan S.M. Wardayati. 2017. Pengaruh Pengalaman Kerja dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Paru Jember. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis Jember*. 27-8 Oktober 2017:158-168.
- Nasir, A. dan R. Oktari. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi* Vol 19(2); 1-14.
- Pulausumbawanews.net. 2018. Dugaan Penyimpangan Dana Desa Mata Segera Ditindaklanjuti.(<http://pulausumbawanews.net/index.php/2018/05/09/dugaan-penyimpangan-dana-desa-mata-segera-ditindaklanjuti>). (Di akses 26 September 2018).
- Pulausumbawanews.net. 2018. Kinerja Kades Di Moyo Utara Diapresiasi Kepala Daerah. (<http://pulausumbawanews.net/index.php/2018/03/05/kinerja-kades-di-moyo-utara-diapresiasi-kepala-daerah/>). (Di akses 26 September 2018).
- Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol 1(1); 1-23.
- Putri, G.Y. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol 1(1); 1-23.
- Saputri, N., R.S. Pancawati, dan Nurabiah. 2018. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Mataram.
- Susanti, I. 2014. Pengaruh *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada SKPD Kabupaten Siak). *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi* Vol 1(1); 1-14.
- Taradipa, P.S. 2017. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Bank Panin Tbk. Cabang Kendari). *Jurnal Akuntansi* Vol 2(1); 27-38.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Wahyudi, A., S. Ngumar, dan B. Suryono. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa (studi pada perangkat desa di kabupaten sumbawa). *Akuntabel*, 16(2), 143-157.